

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SRI MAHARANI  
16.852.20007**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/21

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/21

LEMBAR PENGASAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di  
Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang

Nama Mahasiswa : Sri Maharani

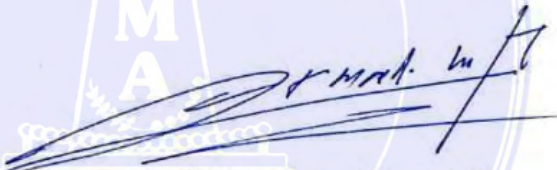
NPM : 16.852.0007

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

  
Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP  
Pembimbing I

  
Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si  
Pembimbing II



  
Nina Angelina, S.Sos, Msi  
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 30 April 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu di dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari beberapa sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukannya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2021

METERAI  
TEMPEL

63F8FAHF8727407761

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
Sri Maharani

16.852.0007

HALAMAN PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini :

Nama : Sri Maharani  
NPM : 16.852.0007  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Isipol  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

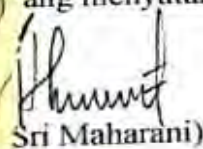
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya saya yang berjudul "Implementasi Program Keluarga  
Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Sosial Kabupaten Deli Serdang"  
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti  
Noneklusif ini Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas  
Royalti Noneklusif ini Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak  
bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format kan, dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan  
mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis Saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : Januari 2021

yang menyatakan



  
Sri Maharani)



## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah, dimana kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Dinas sosial kabupaten deli serdang dalam pelaksanaan program keluarga harapan dari besar nominal yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat. Dalam satu program masih banyak masyarakat menggunakan uang bantuan tidak sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana dinas sosial mengimplementasikan program keluarga harapan di deli serdang dan untuk mengetahui apa saja yang menghambat implementasi program harapan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwasannya faktor penghambat implementasi program keluarga harapan adalah faktor administrasi, kependudukan, tempat tinggal yang tidak jelas, dan tidak tepat sasaran.

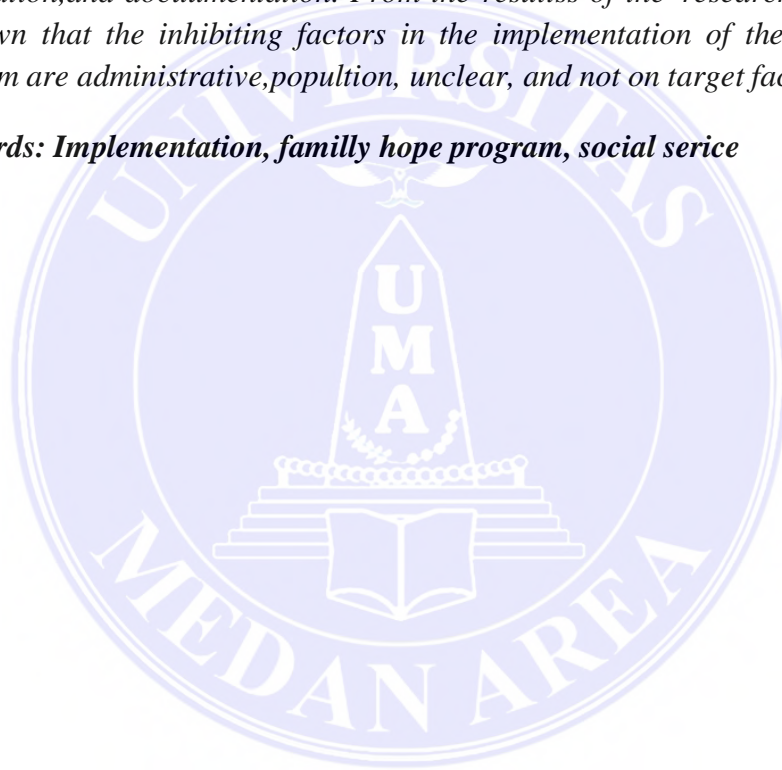
**Kata Kunci : Implementasi, program Keluarga Harapan, Dinas Sosial.**



## ABSTRACT

Poverty is a problem that is often faced by the government, where poverty is a lack of welfare, so that the poor can be interpreted as a condition where there is an inability to meet basic needs, such as food, clothing and health. In Deli Serdang district social service in the implementation of the family expectation program from the nominal amount given by the government to the community in one program many still use aid money improperly and there are still many who should get help but do not get help. The purpose of this research is to find out how the family of hope program in Deli Serdang and to find out what influences the implementation of the family of hope program. The method used by researchers in this study is a qualitative method through interviews, observation, and documentation. From the results of the research conducted, it is known that the inhibiting factors in the implementation of the family hope program are administrative, population, unclear, and not on target factors.

**Keywords:** Implementation, family hope program, social service



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsidengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang”. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana stara satu jurusan Administrasi Negara Universitas Medan Area.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun karena keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Amir Hamzah dan Ibu Erlina yang begitu luar biasa mendukung dan mensupport penulis selama ini, baik dalam memberikan motivasi, nasihat, dan dukungan materi.
2. Bapak Prof. Dr Dadan ramdan, M.Eng, M, Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Heri Kusmanto, MA selaku dekan Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Chairika Nst, S.AP, M.AP selaku sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu kelancaran administrasi kepada penulis.
8. Saudara Kandung Penulis Yaitu Adik Annisa Aulia Rohimma yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk lebih maju dan lebih baik.
9. Abangda Irin Hanafiah Siregar, S.AP dan Kakanda Avrilla Fanka yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
10. Sahabat seperjuangan penulis Pejuang Toga Squad Yaitu Aslihal Anwar, Anggi Dahliana Lubis, Alike Mutiara Zahra, Rizka Khairani Lubis, dan Vernalia Calesna Br Barus yang turut memberikan motivasi, sehingga menumbuhkan semangat penulis
11. Seluruh Keluarga Administrasi Publik stambuk 2016, yang begitu luar biasa kebersamaanya.



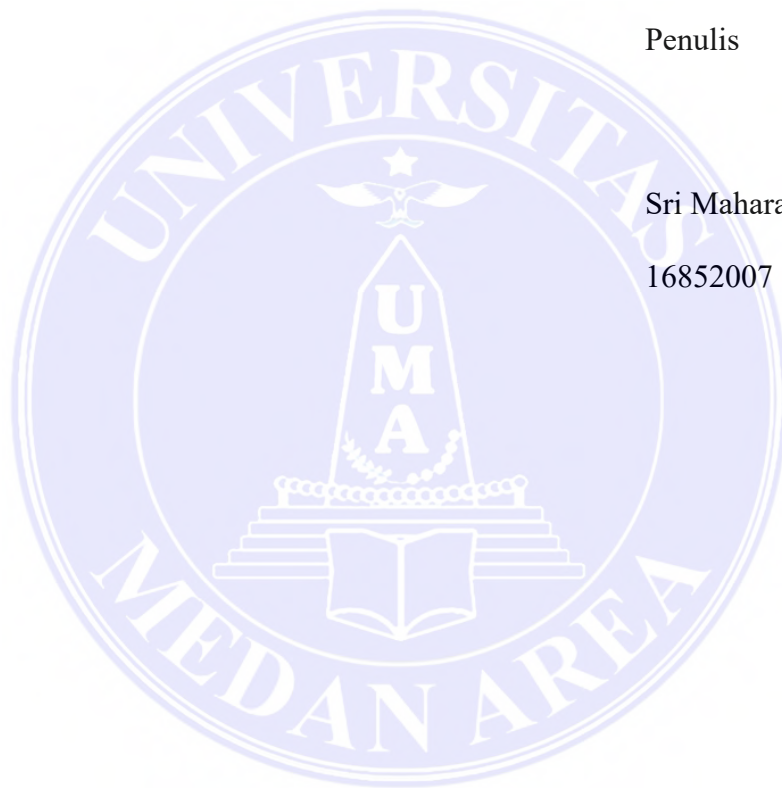
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menambah kesempurnaan dari tulisan ini.

Medan, Januari 2020

Penulis

Sri Maharani

16852007



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latarbelakang.....	2
1.2 Rumusanmasalah .....	4
1.3 Tujuanpenelitian .....	4
1.4 Manfaatpenelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Uraian teoritis.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kemiskinan .....	11
2.2.1 Bentuk – bentuk Kemiskinan.....	14
2.2.2 Penanggulangan Kemiskinan.....	14
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
2.3.1Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	15
2.3.3 Syarat Keepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	16
2.3.4Mekanisme Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) .....	18
2.4 Penelitian Terdahulu .....	23
2.5 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenispenelitian.....	30
3.2 Lokasipenelitian.....	30
3.3 Waktu penelitian .....	30
3.4 Informanpenelitian.....	30
3.5 Teknikpengumpulan data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi umum lokasi penelitian.....	37
4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan.....	37
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.....	38
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang .....	40
4.2Pembahasan penelitian .....	49
4.2.1 Implementasi Program Keluarga Harapan di	

Dinas Sosial Kabupateen Deli Serdang .....	49
4.2.2 Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Program KeluargaHarapan (PKH) di Kabupaten Deli Serdang.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1 Perincian Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 2 Rekapitulasi Penerima Program Keluarga Harapan Kabupaten Deli Serdang.....	51





## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran .....	<b>28</b>
Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang .....	<b>48</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Dokumentasi Tempat Penelitian .....	<b>65</b>
Dokumentasi Wawancara.....	<b>65</b>
Data Informan .....	<b>69</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sering di hadapi oleh pemerintah. Dimana kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai sebagai salah satu hal penghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini adalah Indonesia. Angka kemiskinan ditingkat masyarakat masih cukup tinggi meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwasannya setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, sebesar 25,14 juta orang menurun 0,25% poin dibandingkan September 2018. Menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 an menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018 (<https://www.bps.go.id>).

Untuk meringankan permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, maka pemerintah indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dan salah

satunya adalah Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).

Sasaran Keluarga Harapan adalah masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTS atau sederajat anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Adapun yang di dapati oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diterima dalam satu tahun melalui empat tahap, nilai bantuan merujuk surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan Indeks bantuan PKH pada tahun 2017, yaitu Bantuan Sosial PKH 1.890.000, Bantuan lanjut usia 2.000.000, Bantuan



penyandang disabilitas 2.000.000, yang disalurkan empat kali setahun dalam tiga bulan sekali.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan Program Keluarga Harapan. Kabupaten Deli Serdang Berada di Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang Memiliki 22 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241.68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km<sup>2</sup>. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Deli Serdang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 Dan pelaksanaannya sudah berjalan selama 5 tahun.

Dilihat dari luas dan banyaknya masyarakat yang berdomisili di deli serdang ada beberapa masalah yang sering di hadapi oleh pelaksana dan KPM itu sendiri yaitu seperti, masyarakat masih banyak menggunakan uang bantuan yang di serahkan pemerintah tidak dipergunakan sebagai mana mestinya, seperti bantuan yang seharusnya digunakan untuk keperluan dalam kehidupan menjadi disalahgunakan untuk keperluan lainnya, dan masih ada penerima PKH yang kondisi ekonominya tergolong baik padahal masih banyak warga yang lebih layak menerima bantuan PKH. Dinas Sosial saat bersosialisasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH) menyampaikan agar bantuan PKH digunakan sebagai mana yang harus dipergunakan, dan agar penerima bantuan harus tepat pada sasaran. Apabila bantuan yang sudah di keluarkan tidak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti dalam program ini terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneulis ingin melihat bagaimana implementasi yang terjadi dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh dinas sosial, dalam mengukur sejauh mana implementasi program ini dapat dilakukan berdasarkan teori- teori Implementasi. Dan penulis ingin mencoba meneleti lebih lanjut yang akan dipaparkan dalam bentuk sripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di dinas sosial kabupaten Deli Serdang.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terara dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi peneliti dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Deli Serdang ?
2. ApaFaktor – faktor Pengahambat Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Deli Serdang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana dinas sosial dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Deli Serdang ?

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Deli Serdang ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik. Dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmu pemikiran bagi kajian Implementasi Program Keluarga (PKH) Di Kabupaten Deli Serdang
- b. Hasil penelitian ini bisa sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Khususnya dalam mengembangkan Implementasi Program Keluarga (PKH) Di Kabupaten Deli Serdang

## 2. Manfaat Praktik

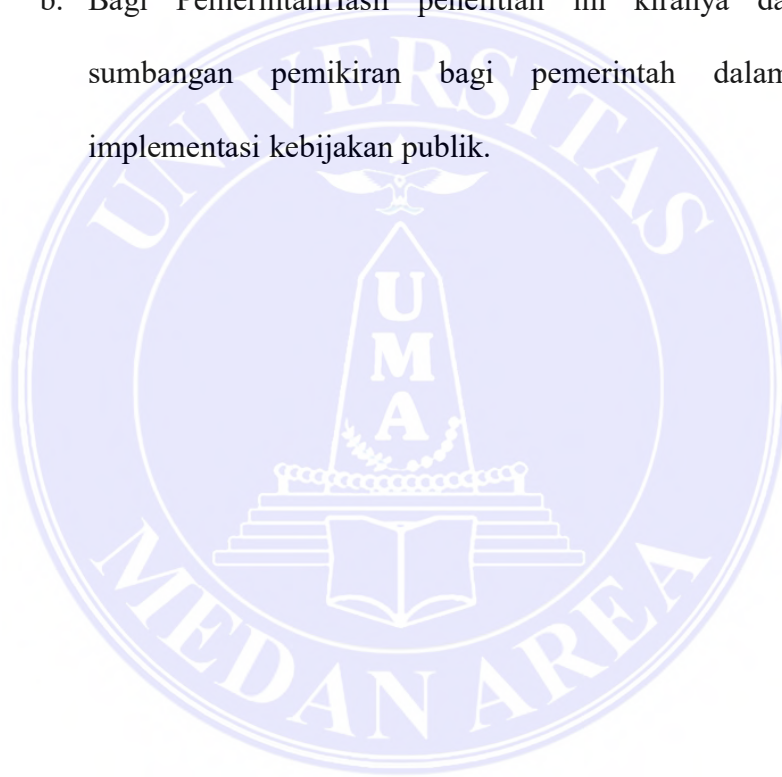
Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut :

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi terkait dengan Program Keluarga Harapan.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan publik.





## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak.

Menurut Indra Muda (2017 :97) pengertian implementasi merupakan “fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil”. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam buku Indra Muda (2017 :97) mendefinisikan implementasi adalah “sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya”.

Menurut Indra Muda (2017:96) implementasi kebijakan merupakan “alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Dedy Mulyadi (2016:12) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi

pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program – program yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negraa dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Kebijakan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implemetasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasih (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureuratic strukture*).

Keempat variabel diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan (*membreakdown*)melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi adalah suatu proses – dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor –

faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi

Model Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III di dalam buku Dwiyanto Indiahono (2009 : 47 – 49) menuju empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

- a. Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran ( target group). Tujuan dan sasaran dari program atau lebih dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam rananya yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah yang berkecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas semua program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

- c. Disposisi, yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel serta kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan kejujuran senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program, komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakannya tahap – tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dan masyarakat dalam menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicatumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.



### 2.1.2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah dan bermatra multidimensional.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:184), kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut dan relatif di suatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar sesuai tata nilai yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Van den Berg, (2005:509) Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka taua akses mereka terhadap barang jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat, keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

### 2.2.2 Bentuk – bentuk Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan dimana orang – orang miskin memiliki pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat

pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan di golongan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduuk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu di sesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.
3. Kemiskinan natural adalah keadan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin Karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, manusia, maupun pembangunan, atau kalau mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan rendah. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, menurut Kartasmita disebut

sebagai “*persisten poverty*” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun.

4. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok, masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki, dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah, menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir bahwa ia miskin karena faktor budaya, seperti malas, tidak disiplin dan boros.
5. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam – macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

## 2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak – hak dasar.
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial, memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas – luasnya dalam pemenuhan dan hak – hak dasar dan peningkatan mutu hidup secara berkelanjutan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Menurut Yusran Lapananda (2013 : 209 -210). Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- Penyuluhan dan bimbingan sosial
- Pelayanan sosial
- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- Penyediaan akses pelayanan kesehatan
- Penyediaan akses pendidikan dasar
- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman
- Penyediaan modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

## **2.4. Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Berdasarkan ([www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)), menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).

### **2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan Program Keluarga Harapan ( PKH) adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan adalah :



1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH
4. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

#### **2.4.3. Syarat Kebersertaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Syarat kebersertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari :

1. Ibu Hamil/Nifas
2. Anak usia di bawah lima tahun (balita), dan Anak usia pra sekolah
3. Anak SD dan yang sederajat
4. Anak SMP dan sederajat
5. Anak SMA dan yang sederajat
6. Anak Penyandang disabilitas

Penerima bantuan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH, yaitu

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita
2. Anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar

3. Anak usia 7 – 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun
4. Anak penyandang disabilitas berusia 0 -21 tahun

Pengurus PKH adalah Ibu pengurus keluarga yang mengurus anak pada keluarga bersangkutan. Untuk pengurus keluarga dengan kondisi khusus, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Jika tidak ada ibu pengurus keluarga, maka wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut seperti nenek/bibi/kakak perempuan dapat menjadi pengurus PKH
2. Jika tidak terdapat wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengurus anak keluarga tersebut, pengurus PKH dapat digantikan oleh kepala keluarga atau wanita dewasa lain yang mampu mengurus anak keluarga tersebut.

Selain itu, masyarakat juga harus membawa dokumen – dokumen yang wajib untuk diserahkan ke dinas sosial untuk mengajukan permohonan penerimaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun dokumen – dokumen yang harus disiapkan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Rekening Listrik Rumah yang ditempati
4. Surat Keterangan Tidak Mampu diketahui oleh Kepala Desa atau Camat
5. Foto Copy Raport

### 2.4.3 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
2. Penetapan Calon Peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepersertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten / kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan persiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kesepakatan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa hal yaitu

:

- a. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan
  - Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan
  - Perlindungan dan jaminan sosial adaptif bagi keluarga yang terkena dampak bencana.
3. Usulan Daerah

Daerah membuat usulan yang memuat hal – hal sebagai berikut

  - Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH

- Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH kab/kota.
  - Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik provinsi maupun kabupaten/kota
- c. Penyiapan Data Awal Validasi

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai data calon peserta yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di daerah.

Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut

- Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah, maka dapat disulkan kepada Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri.

#### 4. Persiapan Daerah

Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal – hal sebagai berikut

- a. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota membentuk Pelaksana Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan
  - b. Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (KPK)
  - c. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten/kota
  - d. Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan
  - e. Melakukansosialisasi PKH
5. Pertemuan Awal dan Validasi

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*)

Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut

- a. Proses Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi



- Data Awal Calon KPM PKH, data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi
- Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan Awal (PA).

#### b. Pelaksanaan Pertemuan Awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal – hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH YAITU

- Menginformasikan tujuan PKH
- Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program
- Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
- Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH
- Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan
- Penjelasan komitmen pendidikan
- Penjelasan tentang pelayanan, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun keatas
- Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program

#### c. Pelaksanaan Validasi

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi. Kegiatan validasi dapat menggunakan aplikasi e – PKH dan formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

d. Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank

Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal *Know Your Customer*(KYS) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal, Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif

6. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan

- a. Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank
- b. Hasil verifikasi komitmen dan /atau pemutakhiran data.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan yang peneliti ambil dikutip dari penelitian La Ode Muhammad Elwan yang berjudul “**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi** “ tahun 2018 dalam jurnal Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara ISSN : 2621-1351 (<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHQ>). Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian jurnal diatas adalah :

1. Implementasi PKH di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi mengenai pengetahuan dan sosialisasi program PKH dilakukan oleh petugas/pendamping PKH di Kecamatan Binongko hanya dilakukan antara penerima program PKH dan petugasnya saja. Sementara, sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, pejabat kelurahan dan masyarakat luas tidak dilakukan dnengan baik. Proses pendaftaran dalam menentukan peserta penerima PKH di Kecamatan Binongko sudah dilakukan dengan prosedur pendistribusian dana PKH kepada penerima PKH atau RTSM, dilakukan oleh petugas PKH dengan dibagikan ke gedung serbaguna kecamatan binongko. Dan dana diterima oleh petugas PKH kerap digunakan untuk keperluan lain diluar ketentuan PKH. Seperti digunakan untuk keperluan sehari – hari
2. Bentuk Program PKH di kecamatab Binongko kabupaten Wakatobi program bidang kesehtaan, jenis program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Peserta

PKH dikenakan persyaratan – persyaratan peserta yang memiliki ibu hamil, anak balita yang belum masuk pendidikan SD. Untuk bidang kesehatan ini belum berjalan sesuai protokolor yang dibuat. RTSM belum menggunakan puskesmas atau poskesdes sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi masih menggunakan sarana program PKH bidang pendidikan, diberlakukan pada peserta PKH yang memiliki anak usia 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan pada lembaga pendidikan dasar (SD) atau SMP/MTS. Dalam implementasi bidng pendidikan pada PKH di kecamatan Binongko masih mengalami kendala, karena ditemukan anak dari RTSM yang tidak bersekolah dengan alasan malas sekolah , dan kurang motivasi orang tua dan lingkungan.

3. Kondisi RTSM di kecamatan Binongko sejak di implementasikannya PKH secara perubahan yang dirasakan oleh peserta program PKH setelah mereka mendapatkan program tersebut terlihat dirasakan manfaatnya, baik dari akses untuk mendapatkan pelayanan kesehtaan, maupun pendidikan. Meski demikian, untuk jangka panjang program PKH yang diharapkan belum terjadi perubahan signifikan terutam pada pola pikir dan prilaku serta kesinambungan terhadap kebaikan kehidupan RTSM. Seperti kesehatan ibu hamil, balita, serta pendidikan anak – anak RTSM/KSMB belum bisa terlihat. Sehingga program PKH yang bisa memutus rantai kemiskinan yang ada kecamatan di binongko belum bisa dilihat dengnan nyata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama – sama membahas tentang Implementasi Program Harapan (PKH). Metode yang digunakan sama – sama menggunakan metode pendekatan kualitatif, berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi lembaga yang akan diteliti, kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edwards III untuk melihat bagaimana dari bentuk komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi dalam menganalisa implementasi Program keluarga harapan (PKH) di kabupaten Deli Serdang. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori daniel mazmanian dan paul sabatier yang memperkenalkan model implemtasi kebijakan public dan digunakan untuk menganalisa omplementasi program PKH di kecamatan Binongko kabupaten Wakatobi.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian atau pernyataan (proporsi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Harbani Pasolong (2016:83) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen, pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu bahwa untuk melihat dan menganalisa implementasi program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Deli Serdang dengan Model Implemetasi



kebijakan publik menurut George C. Edward III di dalam buku Dwiyanto Indiahono (2009 : 47 – 49) menuju empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu Variabel yang pertama Komunikasi, adalah menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran ( target group). Tujuan dan sasaran dari program atau lebih dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam rana yang sesungguhnya.

Variabel Kedua yaitu Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah yang berkecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas semua program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

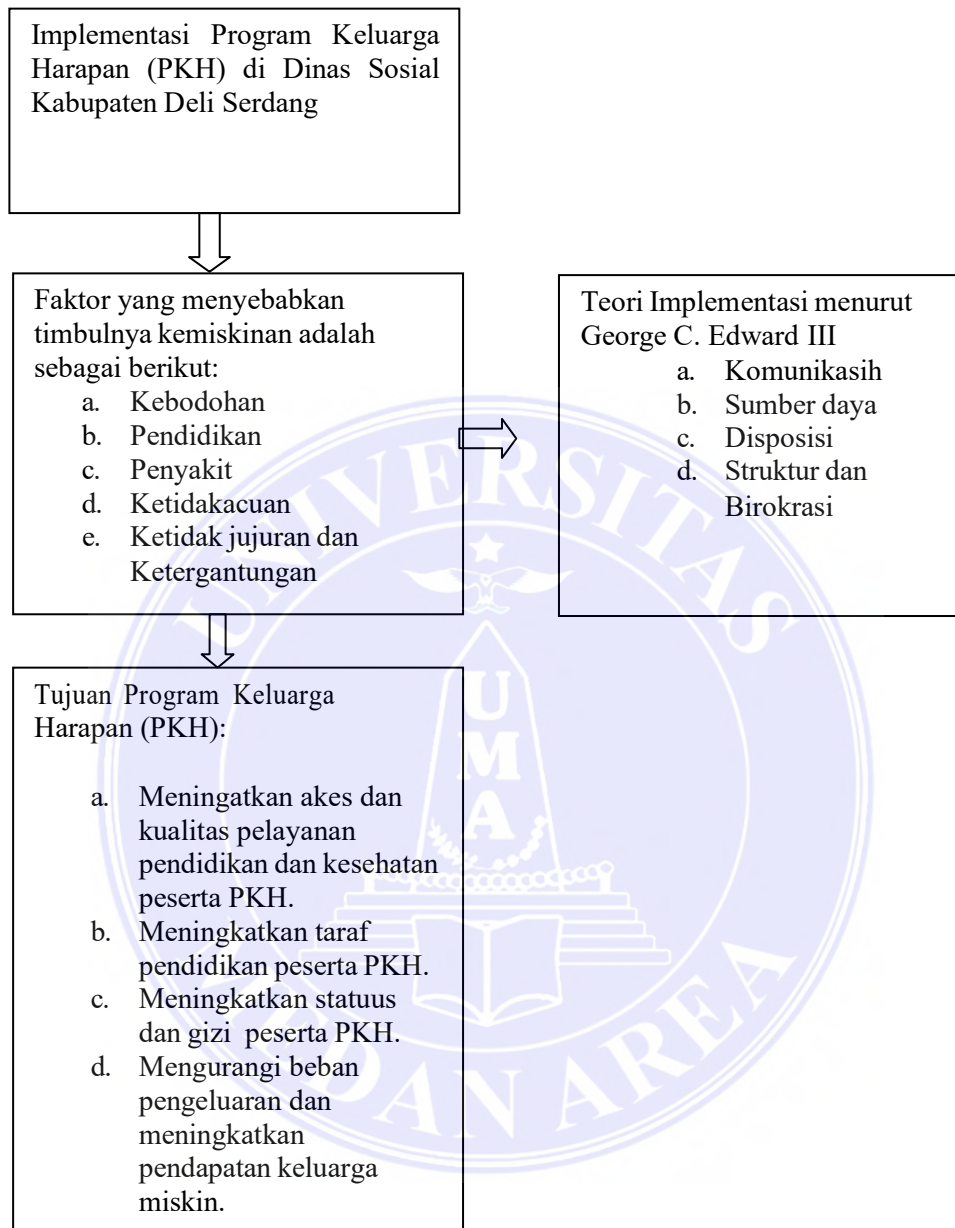
Variabel yang ketiga yaitu Disposisi adalah menunjukkan karakteristik yang menempel serta kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang

penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan kejujuran senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program, komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakannya tahap – tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dan masyarakat dalam menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Variabel yang keempat yaitu Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Jadi, kerangka pemikiran akan muncul apabila suatu penelitian mempertautkan dua variabel atau lebih. Kerangka pemikiran Implementasi Program Keluarga Harapan

(PKH) Kabupaten Deli Serdang Serdang sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencari data – data yang diperoleh dan di himpun oleh informan kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kalimat – kalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti terjun ke lapangan dengan melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap narasumber.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Bodgan dan Taylor (dalam Imam Gunawan 2016:82). Dan menurut Strauss dan Corbin 1997 dalam buku Yusup Soewadji (2012:51) metode kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur – prosedur atau cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian lokasi merupakan objek yang akan diamati dalam penelitian. Penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian adalah di Kantor Dinas Sosial Jl. Medan –

tebing tinggi, Tj. Garbus satu, kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551.

### 3.3 Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian selama bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2010 (selama satu bulan ). Penelitian ini tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang” dilaksanakan sejak judul akhir disetujui oleh dosen pembimbing. Adapun tahap – tahap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tabel.





No	Kegiatan	November 2019				Desember 2019				Januari 2020				February 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Semiar Proposal																				
2.	Data / Penelitian																				
3.	Seminar Hasil																				
4.	Peyusunan Skripsi																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Perbaikan Skripsi																				
7.	Sidang Meja Hijau																				

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

### 3.4. Informan Penelitian

Melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut Hendarso (repository.usu.ac.id) Informan penelitian ada tiga macam, yaitu : Informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*generar informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bernama Bapak Parlaungan Harahap, ST.

2. Informan utama atau umum (*general informasi*), yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bernama bapak Muhammad Rifai Nasution, ST
3. Informan tambahan (*additional informan*), yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bernama Ibu Sit Sawiyah dan Ibu Husni Lubis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan

#### Data 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala – gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data – data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadidalam Sugiyono (2013 : 145)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan. Suharsimi Arikunto (2012 :179)

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.

Menurut Setyadin ( dalam Imam Gunawan, 2016 :160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dan peneliti melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Dan sebelum dilangsungkan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau akeologis.

Menurut Imam Gunawan (2016:175) mengemukakan bahwa sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat – surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam. Menurut Gottschalk (dalam buku imam gunawan, 2016:175) menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data – data yang ada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

#### **4.Triangulasi data**

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan ( kreadibilitas / validitas) dan konsistensi (rehabilitas data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.

Menurut Sugiono (2007:372) mengemukakan bahwa tianggulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.

### **3.6 Metode Analisis Data**

#### **a. Reduksi data**

Menurut Sugiyono(2018:247) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, di cari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah di redukasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutny, dan mencarinya bila perlu.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif (2007:18) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibelitas. Miles and Huberman (2007 :18)



## BAB V

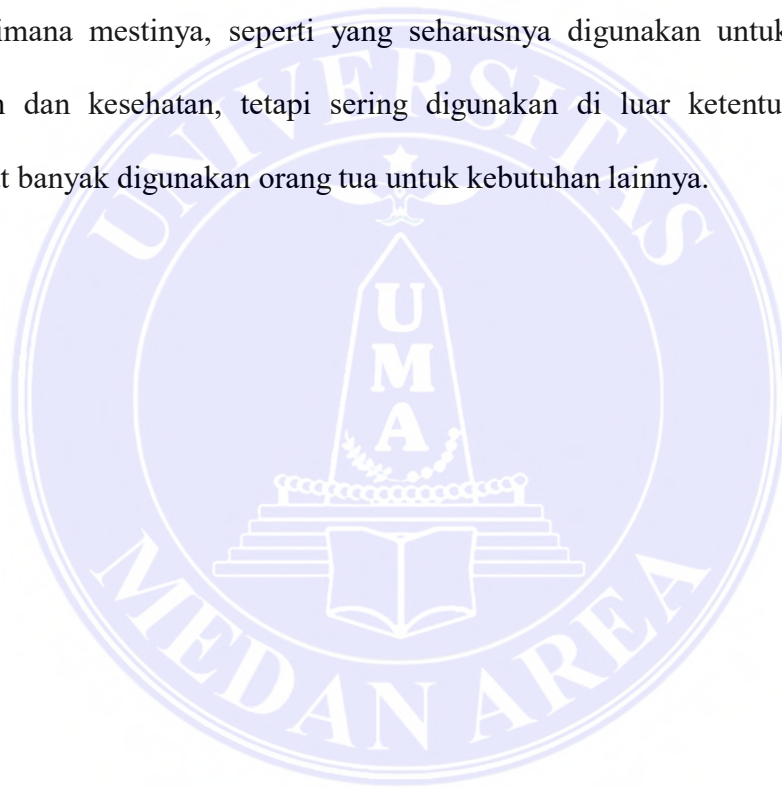
### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah rangkum, serta data – data observasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tergolong baik serta maksimal dalam penerapannya yang dapat diteliti melalui empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana Program Keluarga Harapan (PKH) ini banyak memberi manfaat kepada masyarakat, terkhususnya kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dengan adanya bantuan PKH ini, RSTM banyak mendapatkan manfaat seperti, kehadiran fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) ataupun kehadiran fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).
2. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan ada beberapa faktor penghambat seperti, administrasi kependudukan masyarakat, dimana masyarakat masih banyak yang tidak memiliki KTP, Akte kelahiran dan KK, padahal setiap calon penerima bantuan program keluarga harapan harus lengkap secara administrasi kependudukan. Tempat tinggal yang tidak jelas juga merupakan faktor penghambat, dimana masyarakat setelah mengajukan

Bantuan program keluarga harapan sering tidak mengisi keterangan tempat yang jelas dan masih banyak keluarga sudah meninggal tetapi tidak dilaporkan di kepala desa dan catatan sipil, sehingga dalam pencarian dilapangan oleh pendamping program keluarga harapan tidak ditemukan keberadaannya, hal ini tidak bisa di proses untuk menjadi masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan. Dan yang terakhir adalah tidak tepat sasaran, diamana beberapa penerima Program Keluarga Harapan yang tidak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, seperti yang seharusnya digunakan untuk anak - anak sekolah dan kesehatan, tetapi sering digunakan di luar ketentuan. Dan dana tersebut banyak digunakan orang tua untuk kebutuhan lainnya.



## 5.2. Saran

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang di beri sebagai berikut :

1. Tim pelaksana PKH di kabupaten deli serdang mengadakan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya kepada peserta PKH, tetapi juga kepada pihak – pihak lain seperti pejabat kelurahan, desa, warga , masyarakat luas, sehingga program PKH mendapat dukungan masyarakat secara massif
2. Lebih menguatkan kembali dalam segi pengawasan yang dilakukan dalam program keluarga harapan. Hal tersebut untuk mengurangi masyarakat masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan sehingga kecemburuan yang memicu konflik diantara masyarakat bisa diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Lapananda, Y. (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika

Mulyadi, D. (2016). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Muda, Indra. (2017). *Analisis Kebijakan*. Medan: Media Persada

Pasolong, H. (2015). *Metode penelitian Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.

Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Setiadi, E. U. (2015). *Pengantar Sosiologi*, Bandung : Prenadamedia Group

Usman, Husaini, S. (2017). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi aksara

Pasolong, H. (2015). *Metode penelitian Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.

### Perundang-undangan:

pasal 33 Undang-undang 1945

Undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

### Artikel Internet :

*Hendarso (repository.usu.ac.id) diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 15:00*

*PedomanPelaksanaKeluargaHarapan  
(<https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapa>)*

**Karya Ilmiah :**

Rini Setyo, A (2016) Faktor – faktor kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Universitas Airlangga ISSN 2085-4617*

Elwan Muhammad, L (2018) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongklo Kabupaten Wakartobi .*Jurnal Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia ISSN 2621- 1351*





## LAMPIRAN

### Dokumentasi Tempat Penelitian



Gambar 1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Parlaungan Harahap, ST sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang





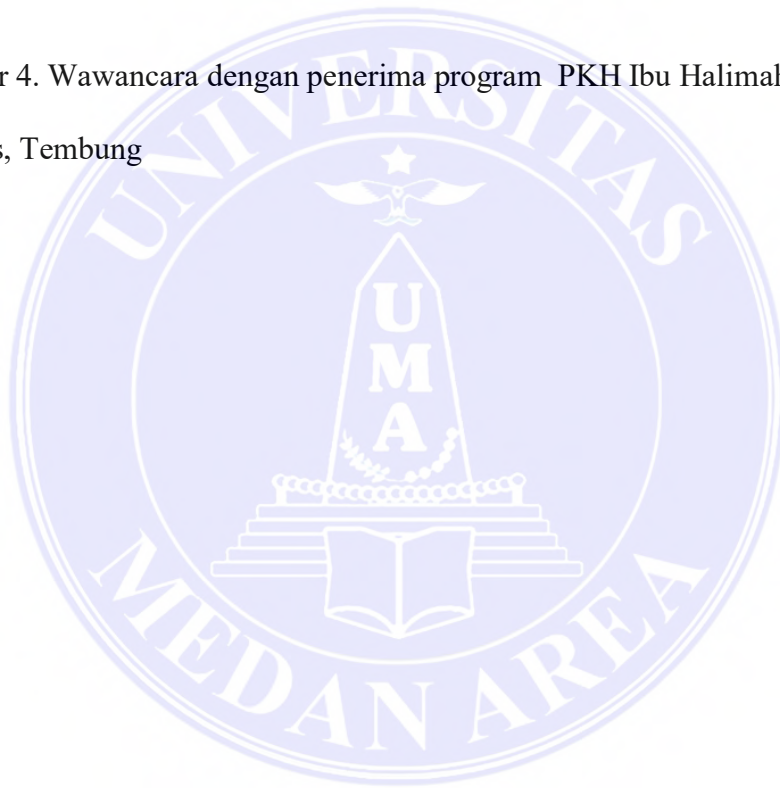
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak M. Rifai Nasution , ST sebagai kepala seksi bidang perlindungan dan jaminan sosial



Gambar 3. Wawancara dengan penerima program PKH Ibu Sawiyah (45) di Jalan Perintis, Tembung



Gambar 4. Wawancara dengan penerima program PKH Ibu Halimah (55) di jalan Perintis, Tembung









# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Karamay Permai 1 Medan Estate/Jalan P1051 Nomor 152 (061) 7366678, 7360168, 736A348, 7366781, Fax (061) 7392098 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Siantan II Nomor 79 / Jalan Tera Sawaya Nomor 70 A, 80 (061) 8201994, Fax (061) 8226331 Medan 20132  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) | Email: [umad@uma.ac.id](mailto:umad@uma.ac.id)

Nomor : 596/FIS.2/01.10/XII/2019  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

13 Desember 2019

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Pimpinan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Deli Serdang  
Jalan Karya Dharma Nomor 4 Lubuk Pakam

di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Sri Maharani  
N P M : 168520007  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, dengan judul Skripsi "*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dr. Heri Kusmanto, MA  
Dekan

CC: File -

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/21

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/21



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS SOSIAL

JL. MAWAR NO. 18 LUBUK PAKAM

TELP. 061. 7956111 – 7956222

E-mail : dinsos@deliserdangkab.go.id

KODE POS : 20514

Nomor : 070 / 147 / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Lubuk Pakam, 14 februari 2020

Kepada Yth,  
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Medan Area  
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Bappeda Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 070/2096/BPDS/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang  
Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN yang dilaksanakan  
oleh :

1. Nama : Sri Maharani
2. Alamat : Jl. Air Bersih Ujung Gg. Melati No. 12 Medan
3. NIM : 1407055611970003
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jurusan : Administrasi Publik
6. Judul Penelitian : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di  
Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
7. Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
8. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
9. Peserta : Sendiri
10. Penanggung Jawab: Dr. Heri Kusmanto, MA

Benar telah melaksanakan Riset/penelitian di Dinas Sosial  
Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi..



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang
2. Kepala Kesbang Kab. Deli Serdang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/3/21

Access From (repository.uma.ac.id)26/3/21

## DATA INFORMAN

### 1. Informan Kunci

Nama : Parlaungan Harahap, ST

Alamat : JL . Bromo Lorong Setuju Medan

Jenis Kelamin :laki - laki

Usia : 52 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pekejaan :Aparatur Sipil Negara (ASN)

### 2. Informan Utama

Nama :Muhammad Rifai Nasution, ST

Alamat : JL. Walet 8 Nomor 131 perumnas Mandala Medan

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 45 tahun

Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pekejaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

### 3. Informan Tambahan

Nama : Siti Sawiyah

Alamat : JL. Perintis tembug

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 52 tahun

Pekejaan : Wiraswasta

Nama : Halimah

Alamat : JL. Perintis tembug

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 45 tahun

Pekejaan : Wiraswasta

